

PENGARUH KARAKTERISTIK KEPALA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI PULAU JAWA

Fadillah Ahmad Fauzi Pratama

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Email: fafafauzi69@gmail.co.id

Doddy Setiawan

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Email: doddy.setiawan@gmail.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik kepala daerah terhadap kinerja pemerintah daerah di Pulau Jawa. Karakteristik kepala daerah yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan meliputi tingkat pendidikan, masa kerja, usia, dan jenis kelamin. Selain variabel-variabel tersebut, penelitian ini juga meneliti beberapa variabel kontrol, seperti ukuran pemerintah daerah dan belanja modal. Penelitian ini menggunakan pengujian regresi data panel. Pengambilan sampel dengan teknik purpose sampling bertujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai standar yang telah ditentukan. Data tersebut mencakup kabupaten/kota di Pulau Jawa, yaitu 119 kabupaten/kota, dan periode pengamatan dari 2017 hingga 2019.

Kata kunci : karakteristik kepala daerah, kinerja ,pemerintah daerah

Pendahuluan

Otonomi daerah selama periode reformasi merupakan langkah untuk mewujudkan desentralisasi di Indonesia, yang berarti otonomi daerah ini sebagai transfer otoritas yang diwariskan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintah dan kepentingan rakyat. Untuk mencapai misi utama dari otonomi daerah yaitu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat yang juga menjadi tujuan utama nasional maka pemerintah daerah harus memiliki tekad dan kemauan yang serius untuk menjalankan praktek dari otonomi daerah yang bertujuan untuk memberdayakan daerahnya masing masing. Tetapi pada kenyataannya pemerintahan daerah di Indonesia sendiri memiliki kendala dalam memenuhi pembiayaan operasionalnya apabila hanya mengandalkan pada pendapatan asli daerah.

Perbedaan dalam pengambilan kebijakan untuk menjalankan pemerintahan di setiap daerah juga disebabkan pada karakteristik yang berbeda tiap daerah, sehingga memberikan hasil kinerja yang bervariasi. Pertumbuhan atas pencapaian dari pemerintah daerah yang telah diukur dalam kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi dasar dari penopang dalam peningkatan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan Upper Echelon Theory, kemampuan pimpinan dalam melakukan meningkatkan kinerja suatu entitas merupakan hal yang lumrah mengingat pimpinan memiliki peran yang luas dalam kebijakan perusahaan. Hambrick dan Mason (1984) juga mengatakan ada peran dalam diri seorang pemimpin baik kognitif maupun psikologis yang mempengaruhi segala kebijakan perusahaan. Beberapa contoh peran psikologis dan kognitif yang mempengaruhi kebijakan antara lain umur, lama jabatan, latar belakang pendidikan, pengalaman karir di bidang lain, dan sosial ekonomi. Upper echelon theory dapat menjelaskan bahwasanya arah strategis dan sumber daya strategis perusahaan dipengaruhi oleh manajemen. (Hambrick dan Mason 1984).

Teori dan Metodologi **Upper Echelon Theory**

Upper Echelon Theory merupakan teori yang membahas tentang hubungan psikologis dengan pengambilan keputusan manajemen tingkat atas. Hambrick dan Mason (1984) menjelaskan bahwa segala bentuk keputusan dalam perusahaan dan performannya dipengaruhi oleh karakteristik manajemen tingkat atas. Mengingat penggunaan Upper echelons theory tentang karakteristik pribadi, termasuk: usia, tingkat pendidikan, masa kerja, dan jenis kelamin semua memperhubungkan karakteristik ini dengan kinerja organisasi (Hambrick, 1984). Kajian ini menjelaskan bahwa karakteristik kepala daerah memiliki peran penting dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah. Dalam sistem pemerintahan daerah yang memiliki wewenang dalam pengelolaan pemerintah daerah adalah kepala daerah. Kinerja penyelenggara pemerintahan adalah hasil dari kebijakan yang diambil oleh kepala daerah di berbagai daerah.

Kinerja Keuangan

Menurut Mahsun (2019: 2.3) mengartikan kinerja sebagai gambaran dari pencapaian atas implementasi suatu kebijakan dalam melaksanakan misi organisasi yang telah dibuat dalam perencanaan strategis. Indikator keuangan dan nonkeuangan dijadikan sebagai sarana dalam melakukan pengukuran kinerja terhadap hasil dari pencapaian suatu aktivitas yang dilakukan suatu entitas atau unit organisasi. Sistem pengukuran kinerja sendiri agar memudahkan manajer publik dalam mengevaluasi hasil dari suatu strategi dengan menggunakan indikator moneter dan nonmoneter. Pengukuran kinerja membantu manajer untuk monitoring implementasi bisnis dengan melakukan perbandingan antara realisasi dan perencanaan tujuan strategis, kemudian pengukuran kinerja juga merupakan alat manajemen yang berfungsi sebagai pemicu terhadap kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Pulau Jawa

Pengertian efisiensi menurut Mahsun (2019: 9.8) bahwa efisiensi sendiri memiliki keterkaitan dengan konsep produktivitas, perbandingan output yang dihasilkan dan input yang dikeluarkan atau yang disebut cost of output) merupakan indikator yang digunakan sebagai pengukuran efisiensi. Kegiatan operasional yang output yang dikeluarkan dapat dicapai dengan input yang serendahnyanya merupakan kegiatan operasional yang dapat dikatakan efisien.

Tingkat Pendidikan Kepala Daerah dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dari berbagai macam penelitian tentang manajer senior banyak yang menggunakan tingkat pendidikan menjadi subjek. Hitt dan Taylor (1991) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa apabila seorang manajer senior yang mengeyam tingkat pendidikan yang tinggi maka kemampuan kognitif yang dimiliki semakin kompleks. Hambrick dan Mason (1984) Memberikan penjelasan bahwa kecakapan kognitif, kecakapan manajemen informasi, dan penerimaan inovasi merupakan pencapaian dari tingkat pendidikan. Berdasarkan paparan diatas maka penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut ini:

H1: Tingkat Pendidikan kepala daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Masa Jabatan dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Lama waktu seseorang menjabat sebuah kedudukan sebagai pemimpin di dalam organisasi merupakan definisi dari masa jabatan. Menurut D. C. Hambrick dan Mason (1984) lama jabatan CEO merupakan salah satu factor yang dapat menentukan baik atau buruknya suatu kebijakan perusahaan. Dalam penelitiannya Hermann dan Datta (2002) menyimpulkan bahwa seorang CEO yang memiliki masa jabatan yang lama akan memiliki kendali tinggi dalam proses pengambilan keputusan, dan akan memiliki lebih banyak keahlian dan pengalaman dalam melaksanakan tanggung jawabnya, seiring dengan meningkatnya kekuasaan dalam organisasi. Berdasarkan paparan diatas maka penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut ini:

H2: Masa jabatan kepala daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Umur Kepala Daerah dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam literatur, Upper echelons theory menjelaskan bahwasanya umur manajer berkorelasi positif dengan tendensi untuk mengamati sejumlah besar informasi dan untuk lebih akurat mengevaluasi informasi ketika membuat keputusan. (Hambrick dan Mason 1984). Umur seorang manajer dapat menunjukkan kematangan seseorang, dan kedewasaan

Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Pulau Jawa

ideologisnya, yang dapat menjadikan pengambil keputusan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik dan dapat mencapai kinerja keuangan yang baik (Pahlevi dan Setiawan 2017). Berdasarkan penjabaran diatas maka penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut ini:

H3: Umur kepala daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Gender Kepala Daerah dan Kinerja Keuangan Daerah

Hambrick dan Mason (1984) dalam penelitiannya menyatakan bahwasanya gender merupakan faktor demografi yang dapat mempengaruhi kebijakan dan strategi perusahaan. Dalam penelitian Ferreira dan Gyourko (2014) menyebutkan bahwa walikota di Amerika Serikat yang memiliki gender perempuan memiliki keterampilan politik yang lebih handal dibandingkan laki-laki. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian Pahlevi dan Setiawan (2017) menjelaskan bahwa laki-laki memiliki kinerja yang lebih buruk dibandingkan perempuan. Berdasarkan penjabaran diatas maka penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut ini:

H4: Kepala daerah perempuan memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan sejawat laki-laki keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hasil hipotesis yang dirumuskan, yang meliputi pengaruh karakteristik kepala daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Pulau Jawa. Ukuran pemerintah daerah dan proporsi belanja daerah digunakan sebagai variabel kontrol. Kriteria pengambilan sampel antara lain: Pemerintah daerah di Pulau Jawa tahun 2017- 2019, Pemerintah daerah yang sudah Menyusun laporan keuangan tahun 2017-2019, dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Pemerintah daerah yang mengutarakan informasi dalam LKPD auditan yang digunakan dalam penelitian, Pemerintah daerah yang data dan informasi terkait karakteristik kepala daerah secara lengkap dapat ditelusuri. Teknik analisis yang dipakai pada penelitian ini yaitu regresi linear berganda. Persamaan untuk uji hipotesis yaitu.

$$KKP = \alpha + \beta_1 Education + \beta_2 Tenure + \beta_3 Age + \beta_4 Gender + \beta_5 Size + \beta_6 Bel + \varepsilon$$

Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
di Pulau Jawa

KKP = Kinerja Keuangan Pemerintah, EDUCATION = Tingkat Pendidikan Kepala Daerah, TENURE = Masa Jabatan Kepala Daerah, AGE = Usia Kepala Daerah, GENDER = Gender Kepala Daerah, SIZE = Ukuran Pemerintah Daerah, dan Bel = Belanja Modal

Hasil dan Pembahasan

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
TINGKAT PENDIDIKAN	0,0332	0,0140	2,3728	0,0184
MASA JABATAN	-0,0023	0,0013	-1,7044	0,0895
UMUR	0,0010	0,0004	2,2352	0,0262
GENDER	-0,0079	0,0099	-0,7980	0,4256
TOTAL ASET	0,0202	0,0068	2,9539	0,0034
RASIO BELANJA MODAL	0,4877	0,0776	6,2828	0,0000
C	0,3699	0,1969	1,8783	0,0614
F Value				0,000
Adjusted R-square	0,2184			

Sumber: Pengolahan Data Eviews 12, 2023

Tingkat pendidikan kepala daerah (EDUCATION) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menegaskan bahwa hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini diterima. Penelitian ini sejalan dengan sudut pandang Hitt dan Taylor (1991), dan Hambrick dan Mason (1984) yang menjelaskan semakin tinggi tingkat pendidikan suatu manajer maka kemampuan kognitif yang dimiliki lebih kompleks. Su & Bui (2016) juga menjelaskan bahwa yang menjadi peranan penting dalam menciptakan daerah yang mandiri adalah tingkat pendidikan pemimpin daerah. Logikanya, orang yang berpendidikan tinggi memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan dengan lebih bagus.

Masa jabatan kepala daerah (TENURE) tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menegaskan bahwa hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini tidak sesuai. Penelitian ini sepham dengan hasil Kusumastuti (2014) yang

Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Pulau Jawa

menyebutkan masa jabatan eksekutif tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib dalam LKPD. Kusumastuti (2014) menyebutkan kemungkinan yang terjadi ketika semakin lama seseorang menjabat yaitu tidak berjalanya proses regenerasi, dan lebih terbukanya kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Berlandaskan penjelasan tersebut, juga didukung oleh Widagdo dan Munir (2017) didalam penelitiannya dijelaskan bahwa perilaku oportunistik muncul dikarenakan jabatan yang lebih lama ditambah pihak legislatif memiliki kekurangan dalam memahami informasi mengenai status keuangan dan status operasi sebuah entitas dibandingkan pihak eksekutif.

Umur kepala daerah (AGE) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil dalam penelitian ini mengkonfirmasi teori upper echelons yang berdalih bahwasanya usia manajer berkorelasi positif dengan tendensi untuk mengamati sejumlah data dan untuk lebih akurat mengevaluasi informasi ketika membuat keputusan (Hambrick dan Mason 1984). Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Pahlevi dan Setiawan (2017) yang mengatakan Usia seorang manajer dapat menunjukkan kedewasaan ideologis seseorang yang dapat menjadikan keputusan yang diambil dalam pengerjaan keuangan daerah menjadi lebih bagus sehingga dapat mewujudkan kinerja keuangan yang bagus.

Gender kepala daerah (GENDER) tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menegaskan bahwa hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini ditolak. Penelitian ini sepham dengan penelitian Kusumawati (2007) yang menjelaskan persepsi karyawan tentang kepemimpinan berbasis gender tidak membuktikan variasi yang nyata, dengan kata lain tidak ada variasi yang nyata antara pemimpin pria dan wanita dalam kepemimpinan transformasional, transaksional, dan

Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Pulau Jawa

non-kepemimpinan berdasarkan persepsi karyawan. Dengan kata lain, orang-orang dengan ciri-ciri yang terkait dengan kepemimpinan (seperti kecerdasan, kepercayaan diri, dan keterampilan sosial) lebih cenderung dilihat sebagai pemimpin dan didorong untuk mengejar karir kepemimpinan, terlepas dari jenis kelaminnya. Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ellwood & GarciaLacalle (2015) yang menyatakan bahwa direktur perempuan tidak memiliki dampak pada kinerja perusahaan. Lam et al (2013) menyebutkan bahwa penurunan kinerja perusahaan disebabkan oleh direktur wanita

Simpulan

Penelitian ini menguji karakteristik kepala daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa pada tahun 2017-2019. Hasil dari uji hipotesis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan umur kepala daerah. Sedangkan karakteristik lain seperti masa jabatan dan gender kepala daerah tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah..

Referensi

- Ellwood, S., & Garcia-Lacalle, J. 2015. The influence of presence and position of women on the boards of directors: The case of NHS foundation trusts. *Journal of Business Ethics*, 130(1), 69-84.
- Ferreira, F., & Gyourko, J. (2014). Does gender matter for political leadership? The case of US mayors. *Journal of Public Economics*, 112, 24-39.
- Hambrick, D., & Mason, P. (1984). Upper Echelons: The Organization as a Reflection of Its Top Managers. *The Academy of Management Review*, 9(2), 193-206.
- Hermann, P., & Datta, D. K. (2002). CEO successor characteristics and the choice of foreign market entry mode: An empirical study. *Journal of International Business Studies*, 33(3), 551-569.
- Hitt, M. A., & Tyler, B. B. (1991). Strategic decision models: Integrating different perspectives. *Strategic management journal*, 12(5), 327-351.
- Kusumastuti, F. A. (2014). Karakteristik Eksekutif, Daerah Otonom Dan Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun 2011).

Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
di Pulau Jawa

- Kusumawati, A. (2007). Kepemimpinan dalam Perspektif Gender: Adakah Perbedaan?. PROFIT: JURNAL ADMINISTRASI BISNIS, 1(1).
- Lam, K. C., McGuinness, P. B., & Vieito, J. P. 2013. CEO gender, executive compensation and firm performance in Chinese-listed enterprises. Pacific-Basin Finance Journal, 21(1), 1136-1159.
- Mahsun, Mohamad. (2019) Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Banten: Penerbit Universitas Terbuka.
- PAHLEVI, Agus Reza; SETIAWAN, Doddy. (2017). APAKAH KARAKTERISTIK KEPALA DAERAH BERDAMPAK TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN?. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, [S.l.], v. 8, n. 3, p. 571-582,.
- Su, T. D., & Bui, T. M. H. 2016. Government Size, Public Governance and Private Investment: The Case of Vietnamese Provinces. Economic Systems, 41 (4), 651-666..
- Widagdo, A. K., & Munir, M. B. (2017). Profil Kepala Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 20(2), 303-330.